

MENGGAGAS PENGUATAN KAJIAN AKHLAK KEWARGANEGARAAN (*CIVIC VIRTUE*) PERSPEKTIF HINDU DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL

I Putu Windu Mertha Sujana

(Universitas Pendidikan Ganesha)

windu.sujana@upi.edu

I Nengah Suastika

(Universitas Pendidikan Ganesha)

nengah.suastika@undiksha.ac.id

Abstrak

Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting dalam mengembangkan ahlak kewarganegaraan (*civic virtue*) yang diperlukan dalam rangka membangun sistem politik demokrasi. Sebagai program kurikuler pada tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berorientasi untuk mempersiapkan warga negara muda agar memiliki kemampuan untuk terlibat dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat politik. Pada masyarakat Indonesia yang multikultural, budaya kewarganegaraan perlu dibangun di atas fondasi akhlak kewarganegaraan, yang meliputi karakter dan komitmen kewarganegaraan berdasarkan pada nilai Pancasila. Nilai Hindu yang dijadikan landasan pengembangan ahlak adalah *Tri Hita Karana* dan *Tri Kaya Parisudha*. Tulisan ini membahas gagasan perlunya penguatan kajian akhlak kewarganegaraan perspektif Hindu, terutama pada komunitas PKn di lembaga pendidikan (berbasis) Hindu untuk memperkuat peran warga negara dalam masyarakat multikultural Indonesia.

Kata Kunci: *Civic Virtue*, Akhlak, Hindu, Multikultural

1. PENDAHULUAN

Diantara karakteristik masyarakat Indonesia yang multikultural adalah hadirnya lembaga penyelenggara pendidikan termasuk di dalamnya masukan (*input*) siswa dalam lingkup pendidikan yang sangat beragam. Hampir di setiap lembaga pendidikan, baik dari mulai tingkat dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi, dapat kita temui peserta didik yang memiliki karakteristik yang berbeda. Kenyataan itu dilatarbelakangi oleh perbedaan kelompok suku bangsa, ras, budaya, agama, gender, maupun bahasa asal mereka. Bukan saja di lingkungan sekolah, mereka juga akan berhadapan dengan berbagai perbedaan lainnya di lingkungan sosial atau budaya mereka sehari-hari. Inilah kekayaan bangsa, sekaligus juga tantangan bagi para pendidik dalam merancang program pembelajaran yang mengakomodir keberagaman itu dengan tetap tidak melupakan fungsi dan tujuan pendidikan.

Menghadapi kondisi kemajemukan itu, para pendidik perlu berpikir ulang tentang bagaimana menjalankan peran dan fungsinya dalam proses pembelajaran di kelas yang siswanya berbeda dalam suku bangsa, ras, budaya, agama, gender, maupun bahasa asal mereka. Sebuah penelitian yang dilakukan tim The LIFE Center dan Center for Multicultural Education di University of Washington, Seattle USA, merumuskan pentingnya pemahaman kembali prinsip-prinsip pembelajaran (*learning principles*) untuk siswa yang multikultural. Laporan itu mengidentifikasi empat prinsip pembelajaran kontemporer yang perlu dipahami oleh penyelenggara pendidikan.

- 1) *Learning is situated in broad socio-economic and historical contexts and is mediated by local cultural practices and perspectives.*
- 2) *Learning takes place not only in school but also in the multiple contexts and valued practices of everyday lives across the life span.*

- 3) *All learners need multiple sources of support from a variety of institutions to promote their personal and intellectual development.*
- 4) *Learning is facilitated when learners are encouraged to use their home and community language resources as a basis for expanding their linguistic repertoires.* (The LIFE Center and Center for Multicultural Education, 2007).

Keempat prinsip pembelajaran di atas terasa tepat dipraktikkan dalam konteks masyarakat multikultural Indonesia. Para siswa perlu diajak untuk memahami lingkungan belajar yang cukup luas, dimediasi oleh praktik dan perspektif budaya lokal, budaya yang merupakan hasil cipta, karsa, dan karya genuine manusia Indonesia. Demikian pula bahwa pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam ruang kelas sekolah yang terbatas, tetapi juga dalam kontes dan nilai yang banyak di luar sekolah. Hal demikian karena setiap pembelajar membutuhkan sumber untuk pengembangan diri dan intelektual mereka.

Proses pembelajaran diharapkan mampu memfasilitasi peserta didik dari berbagai latar belakang untuk dapat mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang mampu menghargai, menghormati dan bekerjasama dengan orang/kelompok dari berbagai latar belakang; berperilaku mengutamakan kepentingan umum; mempromosikan hak individu, keanekaragaman dan kesetaraan; menjunjung kebenaran, cinta tanah air; tidak larut dalam pengkultusan tokoh, kelompok dan partai, ras, etnik, bahasa dan agama/keyakinan; mau mengakui kekurangan dan kesalahan, mau belajar dari kekurangan dan kesalahan, tidak mudah dihegemoni dan mudah mencari kambing hitam atau memanipulasi sesuatu yang merugikan orang lain, tidak mudah berprasangka buruk kepada individu atau kelompok lain; dan kritis sesuai konteks ruang dan waktu (Arif, 2008). Nilai budaya itu diperlukan untuk membangun sistem politik demokrasi konstitusional, yang ditandai oleh adanya kebebasan (berpendapat, berkelompok, berpartisipasi), menghormati orang/kelompok lain, kesetaraan, kerjasama, persaingan, dan kepercayaan (Chamim, 2003).

Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn) di sekolah memerankan peran strategis dalam memfasilitasi siswa agar mampu mengembangkan nilai dan sikap yang menghargai perbedaan, baik di lingkungan sekolah, maupun pada lingkungan luar sekolah yang lebih luas untuk terwujudnya kehidupan demokratis berkeadaban berdasarkan Pancasila. Upaya tersebut, tidaklah hadir dengan sendirinya, tetapi mesti dirancang dan dikembangkan dengan baik agar tidak terjebak pada formalitas belaka. Siswa tidak hanya difasilitasi untuk memahami keberagaman, tetapi siswa juga harus memiliki akhlak kewarganegaraan (*civic virtue*) demi terbentuknya budaya kewarganegaraan (*civic culture*) berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

2. PEMBAHASAN

Perspektif Budaya Kewarganegaraan

Pemahaman tentang budaya kewarganegaraan (*civic culture*) tidak bisa dilepaskan dari studi-studi tentang demokrasi. Konsep ini diperkenalkan pertama kali oleh Gabriel Almond dan Sydney Verba (1963). *Civic culture* dipahami sebagai orientasi psikologis terhadap objek sosial, atau sikap terhadap sistem politik dan terhadap diri sebagai seorang aktor politik (Mujani, 2007). Orientasi ini termasuk pengetahuan atau kepercayaan, perasaan atau afeksi, dan evaluasi atau penilaian terhadap sistem politik secara umum, input dan output politik, dan peran seseorang dalam sistem politik. Diyakini bahwa variasi di dalam orientasi

dan sikap ini mempengaruhi partisipasi dan penerimaan terhadap sistem demokrasi, yang pada gilirannya mempengaruhi stabilitas demokrasi (Mujani, 2007).

Dalam pembahasannya tentang orientasi politik itu, Almond dan Verba meyakini bahwa ada tiga jenis budaya politik: budaya politik parokial (*parochial*), budaya politik subjek, dan budaya politik partisipan. Budaya politik parokial ditandai oleh tidak terdapatnya peranan politik yang bersifat khas dan berdiri sendiri. Hal itu terjadi karena terbatasnya diferensiasi dalam masyarakat. Pada kebudayaan ini, masyarakat cenderung tidak menaruh minat terhadap objek politik yang luas, kecuali dalam batas-batas tertentu, yaitu terhadap tempat dimana ia terikat secara sempit (Kantaprawira, 1988), atau bahkan orang-orang bersikap apatis terhadap atau terasing dari sistem politik yang ada (Mujani, 2007).

Budaya politik subjek cenderung menjadikan orang bersikap aktif terhadap sistem politik yang secara struktural terdiferensiasi, khususnya terhadap sisi output dari sistem ini, namun bersikap pasif terhadap sisi input dari sistem tersebut. Artinya, masyarakat menganggap bahwa dirinya tidak memiliki peran (tiadanya orientasi politik diri) dalam berbagai kebijakan yang disusun oleh suatu sistem politik dan karenanya harus diterima. Sedangkan budaya politik partisipan ditandai oleh adanya orientasi tidak hanya terhadap sistem politik yang terdiferensiasi secara struktural, atau terhadap sisi output sistem ini, tetapi juga terhadap sisi input dari sistem bersangkutan dan terhadap diri sebagai partisipan aktif.

Perpaduan budaya politik partisipan, subjek, dan parokial diyakini memiliki pengaruh positif bagi stabilitas demokrasi. Demikianlah dapat dipahami bahwa budaya kewarganegaraan yang dikembangkan itu bukanlah sekadar budaya politik partisipan, melainkan budaya politik partisipan “plus yang lain”, kombinasi antara aktivisme dan pasifisme (Mujani, 2007). Dan kombinasi itulah yang melahirkan perilaku politik moderat, bukan radikal. Orientasinya bukanlah kepada perubahan yang bersifat revolusioner, melainkan kepada perubahan secara gradual. Itulah kultur politik demokrasi (Mujani, 2007).

Budaya dan tingkah laku demokratis dipahami sebagai kompleks gabungan beberapa unsur, yaitu: keterlibatan kewarganegaraan yang bersifat sekular (*secular civic engagement*), sikap saling percaya sesama warga (*interpersonal trust*), toleransi, keterlibatan politis (*political engagement*), dukungan terhadap sistem demokrasi, dan partisipasi politik (*political participation*) (Mujani, 2007).

Elemen budaya kewarganegaraan yang paling sentral dan perlu dikembangkan adalah kebajikan/akhlak kewarganegaraan (*civic virtue*). Akhlak kewarganegaraan adalah kemauan dari warga negara untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi (... *the willingness of the citizen to set aside private interests and personal concerns for the sake of the common good*) (Quigley & Bahmueller, 1991). Tentang hal ini Quigley dan Bahmueller meyakini bahwa kebajikan kewarganegaraan merupakan domain psikososial individu yang secara substantif memiliki dua unsur, yaitu watak kewarganegaraan (*civic disposition*) dan komitmen kewarganegaraan (*civic commitment*).

Watak kewarganegaraan adalah sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi (... *those attitudes and habit of mind of the citizen that are conducive to the healthy functioning and common good of the democratic system*). Sedangkan *civic commitment* adalah komitmen warga negara yang bernalar dan diterima dengan sadar terhadap nilai dan prinsip demokrasi konstitusional (... *the freely given, reasoned commitments of the citizen to the fundamental values and principles of constitutional democracy*) (Quigley & Bahmueller, 1991:11).

Persoalan Akhlak Kewarganegaraan dalam Masyarakat Multikultural

Kajian budaya kewarganegaraan tidaklah selalu berkaitan dengan politik partisipasi warga negara dalam pemerintahan. Tetapi juga menyangkut sikap dan perilaku keseharian

warga negara. Penulis menyampaikan beberapa fenomena yang menunjukkan sebagian dari sikap dan perilaku warga negara kita. Awal tahun 2015, kita dikejutkan dengan iklan produk rokok yang memasang tagline “Mula-mula Malu Malu, Lama-lama Mau” dengan gambar sepasang laki-laki dan perempuan yang saling berpelukan dan nyaris berciuman. Sontak kemunculan iklan ini menghentak nurani kita. Pro dan kontra muncul. Pro karena iklan itu mengekspresikan seni si pembuatnya, kontra karena iklan itu bukan saja bernada pornografi, yang jelas-jelas dilarang ditampilkan di ruang publik, tetapi juga karena ia sebenarnya menyetujui bahkan mendorong hubungan laki-laki dan perempuan tanpa batas sebelum melewati lembaga perkawinan. Tentu saja, ini tidak sejalan dengan nilai budaya dan adat ketimuran, serta nilai-nilai agama yang sebagian besar dianut masyarakat bangsa Indonesia.

Kasus lain, seorang penulis buku, dengan nada provokatif menulis “tidak salah jika menuruti kemauan pasangan yang sedang dimabuk asmara ketika ia meminta melakukan hubungan layaknya suami istri asmara”. Kisah penulis, hal itu untuk menunjukkan rasa cinta dan kesetiannya kepada pasangan. Yang terbaru, tulisan pada buku pelajaran di sekolah yang dapat kita pahami sebagai membolehkan seseorang (Islam) membunuh orang lain atas dasar keyakinan agama yang berbeda (Arif, 2015). Pada sisi yang lain, kita menyaksikan media televisi, media cetak, online, dan lainnya getol menyuguhkan informasi tentang para pesohor negeri lewat program infotainment (baca: gosip). Tiada hari tanpa gosip. Mulai informasi kedekatan dua pasangan selebriti, jalinan asmara, perkawinan, permasalahan rumah tangga, sampai perceraian disajikan dengan beragam cara untuk menarik publik. Termasuk juga informasi kelahiran, kematian juga menjadi tayangan yang tidak terlewatkan. Pokoknya, segala hal yang berkaitan dengan selebriti, baik atau buruk tersaji lewat infotainment itu. Dalam hal ini, media massa tidak lagi berperan sebagai tuntunan, tetapi lebih berorientasi tontonan semata.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita juga disuguhi adegan “perkelahian” ala wakil rakyat, rebutan jabatan pimpinan partai politik, ada pemimpin yang berkata kasar dan kotor”, tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang makin merejalela, proses penegakkan hukum dan peradilan yang melukai rasa keadilan masyarakat, konflik masyarakat yang berakar dari perbedaan SARA, serta berbagai perilaku penyelenggara negara yang tidak memberi teladan baik bagi warga bangsanya. Persoalan multidimensi di atas, diungkap sebab kita (komunitas PKn) patut merasa prihatin, dan perlu turut ambil bagian memecahkan persoalan itu. Kita perlu melatih warga negara agar memiliki komitmen untuk melaksanakan ajaran *Tri Hita Karana* (menjalin hubungan yang baik antara manusia dengan tuhan, manusia dengan lingkungan, dan sesama manusia) sebagai bagian dari akhlak kewarganegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Akhlak kewarganegaraan perlu terus dikuatkan melalui PKn, terutama menghadapi penetrasi budaya yang tidak sesuai dengan nilai dan karakter bangsa Indonesia. Lebih-lebih pada masyarakat Indonesia yang multikultural yang menurut Winataputra (2012) dikonsepsikan dan dibangun dalam konteks negara-kebangsaan Indonesia modern. Hal itu menurut Winataputra (2012) dapat dicermati dari dinamika praksis kehidupan bernegara Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sampai saat ini dengan mengacu pada konstitusi UUD 1945, dan praksis kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konsep masyarakat multikultural (*multicultural society*) perlu dibedakan dengan konsep masyarakat majemuk (*plural society*) yang menunjukkan keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaan suku bangsa. Multikulturalisme dikembangkan dari konsep pluralisme budaya dengan menekankan pada kesederajatan kebudayaan yang ada dalam sebuah masyarakat (Suparlan, 2005:98). Multikulturalisme ini mengusung semangat untuk hidup berdampingan secara damai (*peaceful coexistence*) dalam perbedaan kultur yang ada baik secara individual maupun secara kelompok dan masyarakat (Azra, 2006, Suparlan, 2005). Individu dalam hal ini dilihat sebagai refleksi dari kesatuan sosial dan budaya dimana mereka

menjadi bagian darinya. Dengan demikian, corak masyarakat Indonesia bukan lagi keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaannya tetapi keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Tabel 1. Transformasi Masyarakat Indonesia Bhinneka Tunggal Ika

Masyarakat Majemuk (<i>plural society</i>)	Masyarakat Multikultural (<i>multicultural society</i>)
Terdiri dari dua atau lebih elemen atau tatanan sosial yang hidup berdampingan, namun tanpa membaaur dalam satu unit politik yang tunggal.	Sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, serta sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain.

Sumber: (Arif, 2008)

Perubahan cara berpikir pluralisme menjadi multikulturalisme yang melandasi realitas multikultural Indonesia adalah perubahan kebudayaan yang menyangkut nilai-nilai dasar yang tidak mudah diwujudkan. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai konsep multikulturalisme yang sesuai dengan konteks Indonesia, dan pemahaman itu harus berjangka panjang, konsisten, dan membutuhkan kondisi politik yang mendukung.

Masyarakat baru yang merupakan pergeseran dari masyarakat majemuk ke masyarakat multikultural Indonesia yang dicita-citakan adalah masyarakat yang menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai yang mengatur kehidupannya sebagai warga suatu bangsa. Dalam pandangan Rahardjo (1999:111), konsep masyarakat baru itu disebut masyarakat utama sebagai masyarakat yang tinggi tingkat perkembangannya, yang memiliki sistem kelembagaan dan mekanisme yang menjamin berlakunya upaya-upaya masyarakat itu sendiri untuk secara otonom mampu melaksanakan *Tri Hita Karana* dan memelihara iman.

Sebagai masyarakat yang multikultural, maka merupakan hak dari anggota masyarakat untuk mengembangkan masyarakat dan budayanya, yang pada gilirannya menyumbangkan yang terbaik kepada masyarakat Indonesia. Inilah inti profil manusia Indonesia baru sebagaimana digambarkan dalam Ketetapan MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Indonesia. Secara umum, gambaran profil manusia Indonesia baru itu disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Profil Manusia Indonesia Baru

PANCASILA	NILAI-NILAI YANG DISANDANG MANUSIA INDONESIA	SUMBER NILAI/SARAN
Ketuhanan Yang Maha Esa	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nilai-nilai etika ➤ Nilai moral 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Agama yang dihayati di dalam masyarakat Indonesia ➤ Kebudayaan daerah (sukusuku Nusantara)
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	<ul style="list-style-type: none"> ➤ HAM ➤ Toleransi ➤ Kerukunan hidup antarwarga/antara agama ➤ Kerja sama global untuk kemakmuran dan perdamaian 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kesadaran hukum/negara hukum ➤ Kerja sama internasional

Persatuan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Saling menghargai perbedaan ➤ Kemauan untuk bersatu ➤ Menghormati simbol-simbol negara persatuan ➤ Rasa bangga sebagai orang Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bahasa Indonesia ➤ Sistem pendidikan dan persekolahan ➤ Interaksi antar warga/ antar suku ➤ Pendidikan multikultural
Kerakyatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nilai-nilai demokrasi ➤ Populis (memihak kepada kepentingan rakyat) ➤ Teknologi yang memajukan kemakmuran rakyat 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Berfungsinya lembaga-lembaga demokrasi ➤ IPTEK
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rasa solidaritas sosial sebagai satu bangsa ➤ Kerja sama dalam menanggulangi masalah nasional (gotong royong) 	Lembaga-lembaga sosial tradisional yang masih fungsional di daerah

Sumber: (Tilaar, 2004)

Tabel di atas menunjukkan profil manusia Indonesia, yaitu manusia Pancasila yang sedang menjadi. Profil tersebut merupakan suatu proses perwujudan nilai-nilai Pancasila yang terus berkembang. Selain itu, nilai-nilai Pancasila yang tercantum di dalam kelima sila Pancasila tersebut merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi sehingga tidak dapat dipisahkan. Keutuhan nilai-nilai tersebut menjiwai seluruh proses humanisasi manusia Indonesia.

Realitas multikultural bangsa Indonesia di atas memberi tantangan sekaligus peluang bagi guru PKn di sekolah. Tantangan guru PKn sekarang adalah menjadikan mata pelajaran itu berkhidmat kepada, dan mendorong penguatan nilai-nilai kemanusiaan karena beragam persoalan sosial budaya yang muncul karena keanekaragaman yang ada. Proses PKn harus bersandar secara kukuh kepada budaya Indonesia untuk melahirkan pandangan dunia, nilai-nilai, dan komitmen terhadap nilai-nilai dan keluruhan martabat manusia yang bertumpu pada kejujuran dan pertanggungjawaban. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Banks (2007) yang menyatakan sekolah sedapat mungkin mempersiapkan para siswa dari berbagai ras, etnis, budaya dan kelompok bahasa ke arah warga negara yang efektif dan merefleksikan budaya dan komunitas kewarganegaraan.

Perlu disadari, bahwa masyarakat multikultural Indonesia tidaklah selalu berdampak positif, melainkan tersimpan beragam potensi konflik yang sewaktu-waktu muncul. Karena itu, empati dan toleransi menjadi nilai dasar yang perlu terus dikembangkan baik dalam proses maupun sebagai output pendidikan. Membawa siswa pada persoalan yang kompleks dan spektrum ruang kelas PKn yang luas dirasa tepat, karena sebagaimana dalam kajian Sosiologi, tindakan manusia tidak pernah terjadi dalam —pulau kosong—. Dalam konteks ini, pembinaan nilai-nilai akhlak kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dari pembentukan iklim sosial yang kondusif bagi munculnya sikap toleran, egaliter, dan partisipatif. Menurut Abdullah (2005), upaya meminimalisir konflik yang terpenting (termasuk dalam masyarakat yang multikultural) adalah melalui penanaman kesadaran kepada masyarakat akan keragaman (plurality), kesetaraan (equality), kemanusiaan (humanity), keadilan (justice) dan nilai-nilai demokrasi (*democratic values*). Dan kesemua itu, dapat dilakukan melalui pembelajaran PKn. Inilah

peluang yang dapat kita ambil sebagai komunitas PKn dalam rangka turut berkontribusi membangun bangsa.

Gagasan Kajian Akhlak Kewarganegaraan Perspektif Hindu

Mengangkat Hindu sebagai dasar kajian akhlak kewarganegaraan dalam PKn tentu bukanlah hal yang biasa. Sepanjang pemahaman penulis, kajian tentang *civic virtue* sebagai komponen penting budaya kewarganegaraan (*civic culture*) diartikan sebagai kebajikan kewarganegaraan yang bersumber dan berorientasi pada nilai-nilai kebajikan umum (etika/moral). Tidak hanya pada lembaga pendidikan umum yang peserta didiknya berasal dari beragam latar belakang suku bangsa, bahasa, dan agama yang berbeda, tetapi pada lembaga pendidikan dengan label agamapun (termasuk Hindu) yang cenderung peserta didiknya homogen dari sisi keyakinan agama, kajian kebajikan kewarganegaraan dalam PKn selalu bersandar pada nilai-nilai kebajikan umum itu.

Walaupun begitu, usaha untuk memberikan warna ke-Agama-an dalam kajian PKn, pernah dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan diikuti oleh Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang menyusun buku ajar PKn (*Civic Education*) untuk Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Selain itu, melalui Indonesia Center for Civic Education (ICCE) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dikembangkan model PKn di Perguruan Tinggi Islam dengan mengembangkan buku ajar “PKn (*Civic Education*): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani”. Namun nilai ke-Hinduan selama penulis ketahui belum ada kajiannya.

Usaha di atas sekalipun baru pada tataran mata kuliah umum di perguruan tinggi patut diapresiasi, sebagai bagian dari penyebaran nilai-nilai Hindu dan kebajikan kewarganegaraan melalui PKn. Sayangnya, gagasan itu belum secara umum dikembangkan sebagai ranah kajian lebih-lebih menjadi penciri kajian PKn pada jurusan/program studi PKn/PPKn pada Perguruan Tinggi/LPTK (berbasis) Hindu. Persinggungannya dengan kajian Pendidikan Agama (Hindu) dan Budi Pekerti barangkali menjadi salah satu alasan komunitas PKn lebih memilih membahas nilai-nilai kebajikan kewarganegaraan tanpa memperkuatnya dengan nilai-nilai agama. Karenanya, tidak keliru, kalau seorang cendekiawan Hindu di negara kita dalam *dharma wacana* yang penulis ikuti, pernah menyampaikan kritik untuk pembelajaran PKn dengan menyebut kajian PKn di sekolah mengajarkan faham pluralisme agama, yang menganggap semua agama baik, hanya demi menjaga nilai-nilai kebaikan bersama.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpandangan, bagi komunitas PKn pada lembaga-lembaga pendidikan (berbasis) Hindu, *civic virtue* perlu dipandang dan dipahami sebagai akhlak kewarganegaraan yang bersumber pada nilai-nilai Hindu. Ini menuntut komunitas PKn untuk mengembangkan, memperkuat dan membelajarkan akhlak kewarganegaraan sebagaimana Hindu menghendakinya. Hal ini sejalan dengan sasaran akhir PKn untuk pembentukan warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizenship*), dimana salah satu komponen warga negara demikian adalah ketaatannya kepada agama yang dianutnya. Bagi penulis, ketaatan kepada agama yang diyakini menjadi penting sebagai dasar mewujudkan masyarakat Indonesia baru yang dicita-citakan. Sebab, agama (Hindu) secara

lengkap telah mengatur aspek keber'agamaan seseorang baik dalam urusan akidah, ibadah, dan akhlak.

Dalam hal akhlak, Hindu telah memberikan rumusan penting dan komprehensif perlunya warga negara memiliki akhlak yang baik dalam hubungannya dengan Ida Sang Hyang Widhi, akhlak sebagai pribadi warga negara, akhlak dalam lingkungan keluarga, akhlak dalam kehidupan bermasyarakat, akhlak warga negara dalam hubungannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, maupun akhlak dalam hubungannya dengan lingkungan konsep ini dikenal dengan *Tri Hita Karana*. Inilah rumusan lengkap akhlak kewarganegaraan yang dapat menunjang terbentuknya warga negara Indonesia yang cerdas dan baik.

Secara terminologi, konsep "*Tri Hita Karana*" berasal dari kata "*tri*", berarti tiga; "*hita*", berarti sejahtera, bahagia, rahayu; dan "*karana*", berarti sumber penyebab. Jadi, "*Tri Hita Karana*", berarti tiga sumber penyebab adanya kesejahteraan, kebahagiaan, dan kerahayuan dalam hidup dan kehidupan semua makhluk ciptaan Tuhan (Sudarma, 1971; Kaler, 1983). Ketiga penyebab kebahagiaan hidup itu adalah apabila dapat terwujud hubungan yang harmonis antara manusia dengan penciptanya (Tuhan Yang Maha Esa), manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungan alamnya. *Tri Hita Karana* ini kemudian berkembang menjadi ajaran keserasian, keselarasan, keseimbangan, dan sekaligus juga tentang ketergantungan satu sama lainnya dalam satu sistem kehidupan. Dikatakan demikian, karena, dalam pandangan masyarakat Hindu Bali, masyarakat selalu berusaha bersikap seimbang terhadap alam sekitarnya. Hal itu dilandasi oleh satu kesadaran bahwa alam semesta adalah kompleksitas unsur-unsur yang satu sama lainnya terkait dan membentuk suatu sistem kesemestaan. Dengan demikian nilai utama masyarakat Hindu Bali adalah keseimbangan atau keselarasan itu sendiri (Dharmayudha dan Cantika, 1991:6).

Prinsip utama keseimbangan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesamanya, dan dengan lingkungan alamnya ini menjadi pandangan dunia masyarakat Bali, baik dalam mengembangkan sistem pengetahuannya, pola-pola perilaku, sikap, nilai-nilai, tradisi, seni, dan sebagainya. Pandangan ini sangat berguna bagi masyarakat Bali dalam usaha memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah-masalah kehidupan yang dihadapi baik dalam hubungan antar individu maupun kelompok. Karena prinsip-prinsip utama ini menjadi dasar bagi pembinaan dan pengembangan sikap, nilai-nilai, perilaku, serta pola hubungan sosial masyarakat Bali, dan prinsip-prinsip ini terinternalisasi serta terinstitusionalisasi dalam struktur sosial kehidupan masyarakat Bali, maka dapatlah dikatakan bahwa nilai-nilai dari ideologi *Tri Hita Karana* ini menjadi *core values* dalam kehidupan budaya masyarakat Bali itu sendiri. *Core values* ini dapat juga menjadi basis bagi standar yang digunakan institusi-institusi utama seperti keluarga, kelompok kekerabatan, dan desa adat di Bali mengevaluasi anggota-anggotanya. Standar inilah yang menjadi kriteria untuk memberikan kesempatan kepada setiap insan manusia Bali mencapai kemajuan dan memperoleh *reward* dari sikap dan tindakannya di masyarakat.

Nilai Hindu lainnya adalah tentang *tri kaya parisudha*, yaitu *kayika* (berbuat yang baik), *wacika* (berkata-kata yang baik), dan *manacika* (memiliki pikiran dan pengetahuan suci). Bekerjanya modal dasar sumber daya manusia ini secara sinergis diyakini menjadi modal utama dalam pengembangan sumber daya manusia Hindu yang berkualitas. Ajaran

yang lain adalah tentang *karma phala* (hukum karma/perbuatan) dan *samsara/punarbawa* (kelahiran atau penderitaan kembali).

Dikatakan bahwa, penafsiran yang benar atas kedua ajaran ini untuk tujuan-tujuan modernisasi masyarakat Bali memberikan landasan kepada masyarakat Bali untuk selalu berupaya berbuat yang baik dan benar untuk memperoleh pahala yang baik dan benar pula, sehingga diharapkan mampu mengantarkan manusia pada pencapaian tujuan hidup tertinggi, yaitu dalam bahasa lokalnya disebut *suka tan mawali duka* (kebahagian abadi yang tidak menyebabkan kembali pada kesengsaraan).

Tuntunan Hindu dalam Weda (Rgveda I.41.6 dan III.29.5 dan Samaveda 502), juga memberikan orientasi nilai rasionalitas kepada masyarakat Bali bahwa untuk mencapai sukses dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, seorang manusia Bali haruslah: (1) aktif mengambil prakarsa, bekerja keras, dan meninggalkan tradisi yang sudah ketinggalan jaman; dan (2) kreatif-inovatif; dan (3) berorientasi ke masa depan. Selain ditemukan dalam kitab-kitab suci Agama Hindu, nilai-nilai-kearifan lokal masyarakat Bali juga terdapat dalam karya-karya sastra, seperti karya sastra yang memuat tentang nyanyian-nyanyian suci, sekar agung (kekawin, sloka, palawakya), sekar madya (nyanyian atau kidung suci) dan sekar alit (pupuh/tembang dalam berbagai jenis dan versinya). Karya-karya sastra ini sarat dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat. Didalamnya juga mengandung nilai-nilai karakter dan ajaran-ajaran tentang etika, estetika, kebaikan, dan sebagainya. Nilai-nilai Hindu tersebut tentunya sangat relevan dijadikan sebagai sumber pembelajaran dan media penanaman ahlak mahasiswa di Perguruan Tinggi.

Perkataan akhlak sesungguhnya adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Akhlak menurut Ilyas (2015:5) haruslah bersifat konstan, spontan, tidak temporer dan tidak memerlukan pemikiran dan pertimbangan serta dorongan dari luar. Dengan demikian, akhlak kewarganegaraan sesungguhnya adalah sikap dan perilaku warga negara yang bersifat konstan, spontan, tidak temporer dan tidak memerlukan pemikiran dan pertimbangan, serta dorongan dari luar.

Dalam kerangka pengembangan kajian PKn termasuk akhlak kewarganegaraan pada lembaga pendidikan (berbasis) Hindu, penulis berpandangan dan mengajak kepada komunitas PKn untuk membangun atmosfer akademik penguatan kajian akhlak kewarganegaraan perspektif Hindu melalui: 1) kajian rutin akademik dengan melibatkan dan mensinergikan komunitas PKn dan komunitas pendidikan Agama dan Budi Pekerti (seperti kelompok dosen/guru Agama Hindu) termasuk para pemuka Agama Hindu untuk melahirkan gagasan dan tanggung jawab bersama dalam pembentukan dan penguatan akhlak kewarganegaraan bagi warga negara; 2) menyebarkan gagasan perlunya penguatan akhlak kewarganegaraan perspektif Hindu dalam berbagai forum ilmiah; 3) memasukkan nilai-nilai Hindu (yang bersumber dari Reg Weda) dalam proses pembelajaran di kelas PKn; dan 4) komunitas PKn diharapkan dapat menjadi teladan yang mencerminkan akhlak kewarganegaraan terpuji bagi para warga negara yang lainnya (termasuk bagi para peserta didik), baik dalam hubungannya dengan Tuhan, akhlak sebagai pribadi warga negara, akhlak dalam lingkungan keluarga, akhlak dalam kehidupan bermasyarakat, maupun akhlak warga negara dalam hubungannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penulis meyakini, melalui penguatan akhlak kewarganegaraan perspektif Hindu yang berdimensi luas pada kajian PKn, komunitas PKn terutama pada lembaga pendidikan (berbasis) Hindu dapat memberikan kontribusi besar bagi perbaikan dan pengembangan bangsa dan karakter menuju masyarakat Indonesia baru yang dicita-citakan.

3. PENUTUP

Simpulan

Membangun atmosfer akademik penguatan kajian akhlak kewarganegaraan perspektif Hindu melalui: 1) kajian rutin akademik dengan melibatkan dan mensinergikan komunitas PKn dan komunitas pendidikan Agama dan Budi Pekerti (seperti kelompok dosen/guru Agama Hindu) termasuk para pemuka Agama Hindu untuk melahirkan gagasan dan tanggung jawab bersama dalam pembentukan dan penguatan akhlak kewarganegaraan bagi warga negara; 2) menyebarluaskan gagasan perlunya penguatan akhlak kewarganegaraan perspektif Hindu dalam berbagai forum ilmiah; 3) memasukkan nilai-nilai Hindu (yang bersumber dari Reg Weda) dalam proses pembelajaran di kelas PKn; dan 4) komunitas PKn diharapkan dapat menjadi teladan yang mencerminkan akhlak kewarganegaraan terpuji bagi para warga negara yang lainnya (termasuk bagi para peserta didik), baik dalam hubungannya dengan Tuhan, akhlak sebagai pribadi warga negara, akhlak dalam lingkungan keluarga, akhlak dalam kehidupan bermasyarakat, maupun akhlak warga negara dalam hubungannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2005). Kesadaran Multikultural: Sebuah Gerakan "Interest Minimalization" dalam Meredakan Konflik Sosial. In M. A. Yaqin, Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan (pp. xi-xx). Yogyakarta: Pilar Media.
- Arif, D. B. (2008). Pengembangan Warga Negara Multikultural Implikasinya terhadap Kompetensi Kewarganegaraan. Sekolah Pascasarjana, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- _____. (2015). *Menggagas Penguatan Kajian Akhlak Kewarganegaraan (Civic Virtue) Perspektif Islam dalam Masyarakat Multikultural*. Bandung. Prosiding Seminar Nasional Penguatan Komitmen Akademik dalam Memperkokoh Jatidiri PKN, halaman 188-198.
- Azra, A. (2006). Pancasila dan Identitas Nasional Indonesia: Perspektif Multikulturalisme. In Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas. Bogor: Brighten Press.
- Banks, J. A. (2007). *Educationg Citizen in a Multicultural Society* (2 ed.). New York: Teachers College Press.
- Chamim, A. I. (2003). Civic Education di Perguruan Tinggi: Beberapa Catatan Pengalaman. In S. Malian, & S. Marzuki (Eds.), Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia (pp. 5-16). Yogyakarta: UII Press.
- Dharmayudha, I M S. dan Cantika, I W. K. (1991). *Filsafat Adat Bali*. Denpasar: Upada Sastra.
- Ilyas, Y. (2011). *Cakrawala Al-Qur'an: Tafsir Tematis tentang Berbagai Aspek Kehidupan*. Yogyakarta: Itqan Publishing
- Ilyas, Y. (2015). *Kuliah Akhlaq*. Yogyakarta: Kerjasama Lembaga Pengembangan dan Studi Islam UAD dengan Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam UMY
- Kaler, I.GK. (1983). *Butir-butir Tercecer tentang Adat Bali. (Jilid 1 dan 2)*. Denpasar: Bali Agung.

- Kantaprawira, R. (1988). *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru.
- Mujani, S. (2007). *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sudarma, N. (1971). *Desa Adat di Bali sebagai Lembaga Sosial Religius Berdasarkan Falsafah Tri Hita Karana*. Denpasar: tidak diterbitkan.
- Quigley, C. N., & Bahmueller, C. F. (1991). *Civitas: A Framework for Civic Education*. Calabasas: Center for Civic Education
- Rahardjo, D. (1999). *Masyarakat Madani, Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Kerjasama Pustaka LP3ES dan Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF).
- Suparlan, P. (2005). *Sukubangsa dan Hubungan Antar Sukubangsa*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- The LIFE Center and Center for Multicultural Education. (2007). *Learning in and out of School in Diverse Environment: Life-Long, Life-Wide, Life-Deep*. Seattle: Center For Multicultural Education
- Tilaar, H. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo
- Winataputra, U. S. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis)*. Bandung: Widya Aksara Press.